



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TITIK UMARNI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **238620**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.245.000.000**

1. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
2. Tanah Seluas 2760 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 1860 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1371 m2/300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 830.000.000
6. Tanah Seluas 1779 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 540.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 162.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 59.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	142.820.649
F. HARTA LAINNYA	Rp.	10.000.000
Sub Total	Rp.	3.618.820.649
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.618.820.649

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.